

THE ANALYSIS OF POTENTIAL FRAUD AGAINST FINANCIAL STATEMENTS WITH DISCLOSURE REQUIREMENT AND IMPLICATIONS OF TAXATION

Muhammad Nur Ismail

Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis STIAM I

Email:mnurismail@gmail.com

ABSTRACT

As a broad legal concept, fraud describes any deliberate fraudulent effort, which is intended to take the property or rights of another person or party. In the context of the audit of the financial statements as a deliberate misstatement. Taxation is very closely related to accounting. Basically, taxes are levied on economic activities of the company. Meanwhile, in charge of the accounting reports of economic activities in the framework of accountability to stakeholders. While the system of taxation which emphasizes trust to the taxpayer. This study focuses on the comparison between the financial statements for the particular income tax purposes compared with disclosure requirement and to determine the impact of taxation, formulate and analyze related research. The analysis of this study uses descriptive method that uses qualitative methods to examine the data in the form of information, the theory of the research library, and then by analyzing the data to resolve the case is formed, so that it can be deduced and advice can be given. The results of this study can be concluded there is potential fraudulent financial reporting in particular for corporate income tax reporting purposes look at the difference with disclosure requirement. This is because the management company did particularly VAT equalization tax on turnover in the corporate income tax by making various adjustments journal accounts in estimates related to income. The impact of taxation which is other than there is a lack of tax to be paid also added administrative sanctions such as penalty interest of 2% per month (maximum 48%) and a 50% penalty tax underpayments.

Keywords: financial statements (income statement), disclosure requirement, tax implications

ABSTRAK

Sebagai konsep hukum yang luas, penipuan menggambarkan upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil properti atau hak orang lain atau pihak lain. Dalam konteks audit atas laporan keuangan sebagai salah saji yang disengaja. Perpajakan sangat erat kaitannya dengan akuntansi. Pada dasarnya, pajak dikenakan pada kegiatan ekonomi perusahaan. Sementara itu, penanggung jawab atas laporan akuntansi kegiatan ekonomi dalam rangka pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Sedangkan sistem perpajakan yang menekankan kepercayaan kepada wajib pajak. Penelitian ini berfokus pada perbandingan antara laporan keuangan untuk tujuan pajak penghasilan tertentu dibandingkan dengan persyaratan pengungkapan dan untuk menentukan dampak perpajakan, merumuskan dan menganalisis penelitian terkait. Analisis penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang menggunakan metode kualitatif untuk menguji data berupa informasi, teori pustaka penelitian, kemudian dengan menganalisis data untuk menyelesaikan kasus yang terbentuk, sehingga dapat ditarik

kesimpulan dan saran bisa diberikan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan ada potensi penipuan pelaporan keuangan khususnya untuk tujuan pelaporan pajak penghasilan perusahaan melihat perbedaan dengan persyaratan pengungkapan. Hal ini karena perusahaan manajemen melakukan secara khusus pajak pemerataan PPN pada omset dalam pajak penghasilan perusahaan dengan membuat berbagai akun jurnal penyesuaian dalam perkiraan yang terkait dengan pendapatan. Dampak perpajakan yang selain ada kekurangan pajak yang harus dibayar juga ditambah sanksi administratif seperti bunga denda 2% per bulan (maksimum 48%) dan pajak penghasilan 50% pajak kurang bayar.

Kata kunci: laporan keuangan (laporan laba rugi), persyaratan pengungkapan,

PENDAHULUAN

Sebagai konsep legal yang luas, kecurangan (fraud) menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan di definisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Menurut Arens (2008:430) pelaporan keuangan yang curang adalah salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang di sengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan itu. Sebagaimana besar kasus melibatkan salah saji jumlah yang di sengaja. Bologna (1993:3) istilah farud yaitu Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver. (Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu). Kriminal bukan digunakan secara ketat dalam arti hukum. Kriminal berarti setiap tindakan kesalahan yang serius yang dilakukan dengan maksud jahat.

Standar Akuntansi Keuangan yaitu PSAK No. 1 (revisi 2009), bahwa laporan keuangan (financial statements) adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali. Laporan keuangan yang lengkap sekurang-kurangnya terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan hasil usaha (laporan laba rugi komprehensif), laporan perubahan ekuitas (owner equity), laporan arus kas (cash flow statement), catatan atas laporan keuangan (notes to financial statement). Akan tetapi laporan keuangan menurut pajak ialah hanya neraca (balance sheet) dan laba rugi (income statement) yang tercermin dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ke 3 atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dalam pasal 1 angka 29 yang dimaksud dalam pembukuan untuk perpajakan yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Namun berdasarkan praktek di lapangan yang ada kebanyakan Wajib Pajak memanipulasi laporan keuangan untuk tujuan pajak khususnya bagi Wajib Pajak Perseroan Tertutup dan atau perusahaan berbasis keluarga.

Berdasarkan data dari Transparency International (2005) Indonesia merupakan negara dengan peringkat korupsi tertinggi di dunia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus yang terkait dengan isu korupsi dan praktek kecurangan seperti likuidasi beberapa bank, diajukannya manajemen BUMN maupun swasta ke pengadilan, kasus kejahatan perbankan, manipulasi pajak, dan lain-lain (Wilopo, 2006). Kasus penggelembungan nilai asset yang dilakukan oleh Indofarma pada tahun 2004 merupakan

salah satu contoh kasus yang sangat merugikan komunitas keuangan di Indonesia. Contoh lainnya adalah kesalahan atau kurang hati-hatian manajemen Bank Lippo dalam memberikan informasi laporan keuangannya yang terjadi pada tahun 2002. Informasi yang menyesatkan tersebut sangat merugikan para investor dan merupakan indikasi besar terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Selain dua contoh tersebut masih banyak kasus-kasus yang diperiksa oleh BAPEPAM yang mengandung indikasi kecurangan yang merugikan banyak pihak dalam jumlah yang sangat signifikan.

Kewajiban pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan sangat bervariasi antara negara maupun antara perusahaan. Misalnya Indonesia, kewajiban pengungkapan di prioritaskan pada perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh dan berdampak material atas laporan keuangan. Sedangkan untuk tujuan pelaporan pajak tidak ada ketentuan khusus yang mengatur kewajiban pengungkapan atas laporan keuangannya. Sehingga informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan komersial dapat menyesatkan pemakai apabila langsung digunakan untuk tujuan perpajakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan PT XXX yang bergerak dibidang Perdagangan Besar sebagai subyek pajak. Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu pasal 28 ayat 1 UU KUP menyebutkan bahwa setiap subyek pajak yang berbentuk orang pribadi maupun badan, wajib menyelenggarakan pembukuan. Hasil dari penyelenggaraan pembukuan tersebut adalah laporan keuangan yang merupakan pertanggung-jawaban pihak manajemen kepada pihak intern maupun ekstern perusahaan. Dalam menyusun laporan keuangan, pihak manajemen menggunakan standard akuntansi keuangan (SAK).

Sehubungan dengan adanya semua permasalahan tersebut diatas, maka penulis ingin meneliti lebih jauh tentang analisis potensi kecurangan atas laporan keuangan pajak yang di laporkan pada SPT PPh Tahunan Badan 1771 dengan pendekatan kewajiban pengungkapan serta implikasi perpajakannya apabila diketahui adanya indikasi kecurangan (fraud) tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu disajikan oleh Hutagaol (2003:97) yaitu pembahasan secara teori mengenai kewajiban pengungkapan atas laporan keuangan komersial dan aspek perpajakannya. Kewajiban pengungkapan diprioritaskan pada perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh dan berdampak material atas laporan keuangan. Sedangkan untuk tujuan pelaporan pajak, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur kewajiban pengungkapan atas laporan keuangannya. Sehingga informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan komersial dapat menyesatkan pemakai apabila langsung digunakan untuk tujuan perpajakan.

Hasil dalam penelitiannya memberi masukan kepada Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih proaktif di dalam mengatur cakupan pengungkapan yang wajib dipenuhi oleh manajemen untuk tujuan perpajakan.

- a. Konsep Kecurangan (*Fraud*). Menurut Robert Cockerall (auditor Ernst & Young) dalam makalahnya "Forensic Accounting fundamental: Introduction to the investigations" dinyatakan bahwa lingkungan profil atau penyebab terjadinya fraud adalah motivasi, kesempatan, tujuan/objek fraud, indikator, metode dan konsekuensi fraud.

Motivasi adalah mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan atau suatu organisasi. Alasan pribadi seperti masalah keuangan dapat menjadi motivasi untuk melakukan kecurangan. Untuk suatu organisasi, fraud pun dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mendapatkan apresiasi yang positif walaupun pekerjaan yang dilakukan tidak baik, misalnya kolusi antara kontraktor/konsultan dengan panitia pengadaan barang/jasa, sarana mencakup seluruh media yang dapat digunakan untuk melakukan kecurangan, misalnya dokumen kontrak/lelang yang diatur, transaksi keuangan dilakukan secara tunai dan tidak menggunakan pencatatan yang baik, dan lain sebagainya.

Tuanakotta (2010:195-206) mengungkapkan secara skematis, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menggambarkan cabang-cabang dari fraud dalam hubungan kerja, beserta ranting dan anak rantingnya. Fraud tree ini disajikan dalam gambar 2.1. Gambar ini sengaja tidak diterjemahkan karena tidak selalu ada istilah padanan yang menggambarkan makna aslinya. Para akuntan memahami istilah bahasa Inggris dalam *fraud tree*. Tiga cabang utama dalam fraud tree yakni corruption, asset misappropriation, dan fraudulent statements.

- b. Konsep Akuntansi. Menurut Irton (2009: 22) Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi kepada pihak-pihak tertentu untuk pengambil keputusan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. SAK adalah pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk etintas yang berada dibawah pengawasannya.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu PSAK No. 1 (revisi 2009), bahwa laporan keuangan (financial statements) adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali. Laporan keuangan yang lengkap sekurang-kurangnya terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan hasil usaha (laporan laba rugi komprehensif), laporan perubahan ekuitas (owner equity), laporan arus kas (cash flow statement), catatan atas laporan keuangan (notes to financial statement).

- c. Konsep Pajak. Soemitro yang dikutip Resmi (2005:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ke 3 atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dalam pasal 1 angka 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UU KUP dalam pasal 1 angka 29 yang dimaksud dalam pembukuan untuk perpajakan yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun

pajak tersebut.

Lubis, Irwansyah (2009:87). Rekonsiliasi fiskal itu sendiri adalah usaha mencocokkan perbedaan penghasilan neto yang terdapat dalam laporan keuangan komersial penghasilan neto (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi) dengan perbedaan penghasilan neto yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan prinsip fiskal). Menurut Waluyo (2008:236) akibat diadakannya rekonsiliasi inilah memunculkan koreksi atau penyesuaian fiskal baik positif maupun negatif. Dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan pada Penghasilan Kena Pajak.

- d. Konsep Kewajiban Pengungkapan. Menurut Hutagaol (2003:99) definisi dari kewajiban pengungkapan (disclosure requirement) itu sendiri ialah:

Catatan atas laporan keuangan yang disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai dengan komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi tersebut berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas yang sifatnya memberi penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.

Tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh penilaian judgment manajer. Tingkat pengungkapan yang makin mendekati pengungkapan penuh (full disclosure) akan mengurangi asimetri informasi yang merupakan kondisi yang dibutuhkan (necessary condition) untuk dilakukannya manajemen laba (Trueman and Titman, 1998).

- e. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Laporan Keuangan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (UU PT) Pasal 68 Ayat 1 UU PT, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila: (1) kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat; (2) Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; (3) Perseroan merupakan Perseroan Terbuka; (4) Perseroan merupakan persero; (5) Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau (6) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.”

Pasal 68 Ayat 2 UU PT, dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS. Pasal 68 Ayat 3 UU PT, laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena dalam melakukan penelitian ini tidak membuat pernyataan-pernyataan hipotesis tentang objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pemilihan tipe ini didasarkan atas pertimbangan oleh karena sulitnya memperoleh data kuantitatif sehubungan dengan kewajiban perpajakan dari wajib pajak tersebut, maka untuk mempermudah penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Menurut Irawan, Prasetya (2000:77-78) bahwa metode penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif, naturalistik, dan berhubungan dengan sifat data yang murni kualitatif. Dalam penelitian akan menguraikan data yang berupa informasi dan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, peraturan, data tertulis lain dan data yang didapat dari wawancara kepada pihak terkait yang relevan dan

praktisi sesuai dengan objek penelitian, dari hasil wawancara yang disampaikan tersebut, kemudian penulis analisis atas perhitungan dan terhadap jawaban tersebut di atas kemudian dikaji berdasarkan literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian untuk memecahkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan memberikan saran dan pemahaman mengenai jenis fraud yang dilakukan oleh PT XXX serta perhitungan PPh Badan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan yang terpenting dampak perpajakan terkait kesalahan dalam laporan keuangan fiskal yang telah dilaporkannya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang utama digunakan dalam penulisan ini adalah melalui studi kepustakaan. Studi ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku literatur, majalah, artikel dan undang-undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Adapun tujuan dari studi kepustakaan ini adalah untuk mendapatkan kerangka teori dalam penentuan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan yang sesuai dengan konteks permasalahan tesis ini. Selanjutnya sebagai pelengkap dalam penelitian ini juga menggunakan studi lapangan. Studi ini dilakukan dengan cara wawancara menggunakan pedoman wawancara kepada pihak-pihak yang dalam tugas/jabatannya banyak berhubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan tesis ini.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deskriptif yang sifatnya hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek yang menyangkut dengan perhitungan PPh Badan dan laporan keuangannya serta ditambahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pihak terkait yang relevan dan praktisi sesuai dengan objek penelitian. Terhadap jawaban tersebut di atas kemudian dikaji berdasarkan literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian, yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Deskripsi Objek Penelitian

Unit penelitian ini dilakukan pada sebuah perusahaan tertutup dengan memiliki karakteristik perusahaan keluarga. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti tidak mengungkapkan nama perusahaan yang sebenarnya guna menjaga kerahasiaan perusahaan tersebut. Namun untuk tujuan akademisi dan keilmuan nama subjek yang peneliti teliti diganti dengan PT XXX. Untuk sumber dan data terkait unit penelitian ini dapat dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Laporan Keuangan Untuk Pajak

Wajib Pajak juga memiliki kewajiban untuk memungut atau memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan/ terutang kepada pihak lainnya. Tata cara pemenuhan kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang no 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008 beserta peraturan pelaksanaannya. selama tahun pajak 2009 diperoleh data laporan rugi laba yang belum dikoreksi fiskal sebagai berikut:

Laporan Laba Rugi PT XXX (Lampiran SPT)	
Sales	106.470.626.719
Harga pokok penjualan	82.408.265.081
Laba kotor	24.062.361.638
Biaya operasional:	
Gaji	2.945.553.336
Administrasi & umum	3.874.846.514
Promosi	391.011.147
Transport	3.426.977.554
Pemeliharaan dan perbaikan	1.038.167.364
Penyusutan	1.055.266.833
Asuransi	270.248.678
Listrik & PAM	325.910.179
Telepon	243.876.879
Kesejahteraan	62.154.500
Sumbangan	341.502.810
PBB & pajak lainnya	378.263.736
Bunga pinjaman, biaya provisi	5.305.094.140
Jumlah biaya operasional	19.658.873.669
Laba operasional perusahaan	4.403.487.969
Pendapatan (biaya) dari luar usaha:	
Pendapatan jasa giro	961.807.624
Pendapatan sewa ruangan	378.664.940
Pendapatan investasi properti	615.477.000
Pendapatan selisih kurs	1.704.405.879
Biaya pajak giro	(192.361.525)
Biaya pajak sewa ruangan	(14.400.000)
Biaya PPhTB	(30.773.850)
Biaya administrasi bank	(1.408.413.497)
Biaya lain-lain	(1.064.558.659)
Jumlah pendapatan (beban)	949.847.912
Laba bersih sebelum pajak	5.353.335.882
Pajak	1.299.483.360
Laba bersih setelah pajak	4.053.852.522

Dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang, Orang pribadi atau badan yang mengadakan pembukuan mendasarkan diri dari laporan keuangan komersial. Dari laporan komersial tersebut selanjutnya dilakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah suatu sistem penyesuaian pelaporan penghasilan Wajib Pajak secara komersial menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang akhirnya dihasilkan laba/rugi fiskal.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan prinsip antara prinsip komersial dan prinsip fiskal. Laporan keuangan yang disusun perusahaan biasanya harus disesuaikan dengan peraturan fiskal ketika laporan keuangan tersebut sebagai dasar pada SPT Pajak Penghasilan yang disampaikan ke kantor pajak. Hal ini disebabkan laporan keuangan perusahaan mengacu pada standar akuntansi komersial.

Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan penyesuaian fiskal (koreksi fiskal).

Penelitian ini tidak mengulas rekonsiliasi fiskal secara terperinci, hanya sebatas analisis potensi kecurangan laporan keuangan untuk tujuan pajak terhadap kewajiban pengungkapan dan implikasi perpajakannya.

c. Kewajiban Pengungkapan Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan ditujukan untuk memperkuat atau memperjelas pos-pos yang disajikan dalam bagian utama laporan keuangan (laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas). Dalam kebanyakan kasus, semua data yang diperlukan pembaca, tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan itu sendiri, oleh karenanya laporan tersebut mencakup informasi yang esensial harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Menurut Hutagaol (2003:99) definisi dari kewajiban pengungkapan (disclosure requirement) itu sendiri ialah catatan atas laporan keuangan yang disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai dengan komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi tersebut berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas yang sifatnya memberi penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya. Berikut ini catatan atas laporan keuangan yang disajikan oleh PT XXX:

Penjelasan Pos-pos Laba Rugi:

Penjualan	Rp 97.130.985.746
Penjualan Alat Kesehatan	Rp 58.112.677.022
Penjualan BBM	Rp 39.018.308.724
Harga Pokok Penjualan	Rp 70.572.243.599
HPP-Alat Kesehatan	Rp 35.127.472.670
HPP-BBM	Rp 35.444.770.929
Beban Usaha	Rp 15.515.579.595
Beban Pemasaran	Rp 6.034.889.755
Beban komisi sales proyek	Rp 27.102.877
Beban komisi eksternal	Rp 25.000.000
Beban entertaint	Rp 247.213.570
Beban perjalanan proyek	Rp 163.256.875
Beban pengiriman barang proyek	Rp 365.586.796
Beban komisi swasta	Rp 787.465.625
Beban iklan, promosi, dll	Rp 72.894.700
Beban seminar, sponsorship	Rp 18.800.000
Beban perjalanan swasta	Rp 451.342.492
Beban pengiriman barang swasta	Rp 1.871.068.030
Beban instalansi	Rp 1.935.203.765
Beban perbaikan alat tehnik	Rp 69.955.025
Beban Pegawai	Rp 4.010.289.431
Beban gaji & upah	Rp 3.335.916.000

PPh 21 karyawan	Rp	168.129.878
Beban konsumsi	Rp	113.595.500
Beban lembur	Rp	48.073.600
Beban pengobatan	Rp	16.100.500
Beban asuransi (Astek)	Rp	12.317.760
Beban asuransi kesehatan	Rp	106.046.334
Beban kesejahteraan lainnya	Rp	46.664.000
Beban pendidikan & pelatihan	Rp	17.421.000
Beban imbalan kerja	Rp	146.024.859
Beban Administrasi & Umum		Rp 2.689.187.609
Beban alat tulis kantor	Rp	86.013.500
Beban fotocopy, koran, majalah	Rp	17.354.450
Beban materai & benda pos	Rp	25.826.000
Beban pengiriman barang	Rp	206.751.740
Beban BBM	Rp	244.410.212
Beban PAM	Rp	38.472.700
Beban perlengkapan	Rp	64.170.500
Beban komputerisasi	Rp	121.337.250
Beban Lain-lain		Rp 2.781.212.802
Beban entertainment	Rp	133.701.082
Beban premi asuransi kendaraan	Rp	123.901.584
Beban premi asuransi lainnya	Rp	27.983.000
Beban PBB dan pajak kendaraan	Rp	169.221.023
Beban pajak	Rp	394.443.374
Beban dokumen dan perizinan	Rp	194.469.750
Beban fee notaris, pengacara	Rp	574.395.260
Beban fee akuntan publik	Rp	50.350.000
Beban penyusutan gedung	Rp	228.171.914
Beban penyusutan kendaraan	Rp	356.325.599
Beban penyusutan inventaris kantor	Rp	528.250.215
Pendapatan (Beban) Diluar Usaha		Rp 9.768.505.539
- Pendapatan Diluar Usaha		Rp 12.107.266.111
Pendapatan bunga	Rp	961.807.624
Laba (rugi) selisih kurs		Rp1.703.248.313
Laba anak perusahaan	Rp	9.207.545.234
Pendapatan lain-lain	Rp	234.664.940
- Beban Diluar Usaha		Rp 2.338.760.572
Beban administrasi	Rp	1.726.667.117
Beban sumbangan, hadiah, iuran	Rp	119.722.810
Beban zakat	Rp	221.780.000
Beban lain-lainnya	Rp	270.590.645

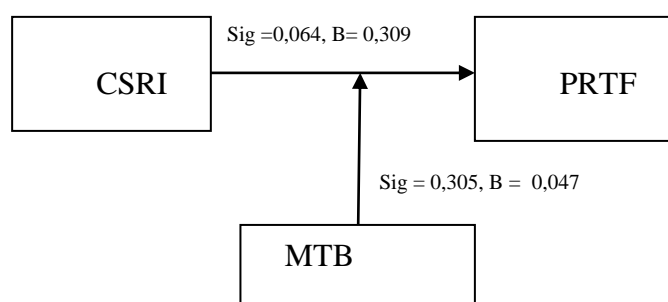
d. Potensi Kecurangan Atas Laporan Keuangan Untuk Pajak

Berikut peneliti akan menyandingkan laba rugi yang disampaikan pada lampiran SPT Tahunan PPh Badan PT XXX dengan laba rugi hasil kewajiban pengungkapan (*disclosure*):

No.	Akun/Perkiraan	Laba Rugi	Disclosure	Ket
1.	Sales	106.470.626.719	97.130.985.746	
2.	HPP	82.408.265.081	70.572.243.599	
3.	Laba Kotor	24.062.361.638	26.558.742.147	
4.	Biaya Operasional	19.658.873.669	15.515.579.595	
5.	Laba Operasional	4.403.487.969	11.043.162.552	
6.	Pendapatan (Beban Diluar Usaha)	949.847.912	5.016.609.018	I
7.	Laba bersih sebelum pajak	5.353.335.882	16.059.771.569	
8.	Pajak	1.299.483.360	1.931.882.444	
9.	Laba bersih setelah pajak	4.053.852.522	14.127.889.125	
Rekonsiliasi Fiskal				
10.	Koreksi fiskal positif			
a.	Biaya entertaint	-	380.914.652	
b.	Biaya kepentingan P.Saham	89.255.279	137.333.767	
c.	Biaya sumbangan dll	341.502.810	321.857.299	
d.	Biaya denda pajak	80.493.762	80.493.762	
e.	Biaya Lain-lain	497.709.847	146.024.859	
11.	Koreksi fiskal negatif			II
a.	Biaya penyusutan	-	57.480.895	
b.	Pendapatan (final)	1.721.284.624	961.807.624	
c.	Lain-lain	-	9.207.545.234	
12.	Laba kena pajak	4.641.012.954	6.899.580.155	
13.	PPH Badan	1.299.483.360	1.931.882.444	

Pengujian Hipotesis

Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa daya informasi akuntansi berpengaruh pada hubungan CSR dengan PRTF. Berdasarkan hasil analisis *moderated regression analysis* (MRA), variabel moderating MTB memiliki nilai koefisien positif 0.047 dengan nilai signifikansi uji t yang diperoleh sebesar 0.305 lebih besar dari 0,05, maka variabel MTB tidak berpengaruh signifikan terhadap PRTF dan dapat disimpulkan hipotesis penelitian belum dapat diterima. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa MTB terbukti sebagai variabel pemoderasi, yaitu memperkuat pengaruh positif variabel CSRI terhadap PRTF, artinya apabila CSR berpengaruh positif sebesar 0,309 terhadap PRTF maka pengaruh positif CSR terhadap PRTF semakin bertambah sebesar 0.047 akibat adanya variabel MTB. Gambar 3 menunjukkan model pengaruh CSR pada PRTF dengan daya informasi akuntansi sebagai variabel pemoderasi.



Gambar 3. Model Pengaruh Daya Informasi Akuntansi Pada Hubungan CSR Dengan PRTF

Pembahasan. Pengujian secara uji signifikan, variabel independen Corporate Social Responsibility, variabel moderating *Market to Book Value of Equity Ratio*, serta variabel control yang digunakan adalah ukuran perusahaan (*ln_size*). Variabel independen terhadap profitabilitas dengan memasukkan variabel control yang ditemukan cukup rendah yaitu sebesar 10.1 % ($\text{Adjusted } R^2 = 0.101$). Hal ini berarti bahwa secara uji signifikan Corporate Social Responsibility, *Market to Book Value of Equity Ratio* dan ukuran perusahaan (*Ln_Size*) mampu mempengaruhi profitabilitas sebesar 10.1%. Sisanya sebesar 89.9% dipengaruhi variabel lain diluar variabel yang digunakan. Tingkat $\text{Adjusted } R^2$ yang rendah ini menunjukkan perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menambah variabel lain sebagai pengaruh profitabilitas perusahaan. Apabila nilai signifikansinya, secara simultan variabel yang digunakan berpengaruh secara signifikan dengan nilai F sebesar 3.506 ($p=0.020$; $p<0.05$).

Pengungkapan *profitabilitas (ROA)* rata-rata sebesar 11% menunjukkan bahwa rata-rata profit yang didapat perusahaan untuk pengungkapan informasi yang dianggap sebagai investasi jangka panjang perusahaan relative masih kecil. Pengungkapan *Corporate social responsibility index (CSRI)* rata-rata 23 % menunjukkan bahwa rata-rata jumlah item pengungkapan CSR pada perusahaan sampel masih rendah, Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan sedikitnya pengungkapan social yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, antara lain: (1) Perusahaan telah melakukan pengungkapan pada periode sebelumnya, sehingga merasa tidak perlu mengungkapkannya lagi; (2) Perusahaan tidak merasa perlu melakukan pengungkapan pada item-item tertentu, karena menganggapnya sebagai hal yang biasa. Misalnya perusahaan tidak mengungkapkan donasi ke lembaga keagamaan atau sponsorship kegiatan kampus, karena menganggap informasi tersebut sesuatu yang wajar dan nilainya tidak signifikan sehingga tidak perlu diungkapkan.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Profitabilitas* Perusahaan

Penelitian ini menunjukkan bahwa CSR yang diproksi dengan CSRI terbukti tidak berpengaruh terhadap PRTF. Ini ditunjukkan dengan hasil statistik CSRI yang memberikan koefisien parameter 0,309 dengan tingkat signifikansi 0,064 yang berarti memberikan pengaruh yang tidak signifikan kepada PRTF. Walaupun hasil yang diperoleh tidak signifikan tetapi banyak manfaat yang diperoleh perusahaan dengan pelaksanaan *corporate social responsibility*, antara lain produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati investor. *Corporate social responsibility* dapat digunakan sebagai alat *marketing* baru bagi perusahaan bila itu dilaksanakan berkelanjutan. Akan tetapi dengan melaksanakan CSR, citra perusahaan akan semakin baik sehingga loyalitas konsumen makin tinggi.

Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu yang lama, maka penjualan perusahaan akan semakin membaik, dan pada akhirnya dengan pelaksanaan CSR, diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan juga meningkat (Satyo, 2005 dalam Sutopoyudo, 2009). Oleh karena itu, CSR berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan sebagai hasil dari peningkatan penjualan perusahaan dengan cara melakukan berbagai aktivitas sosial di lingkungan sekitarnya.

Pengaruh Daya Informasi Akuntansi sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dan *Profitabilitas* Perusahaan

Penelitian ini menunjukkan bahwa daya informasi akuntansi yang diukur dengan *Market to Book Value of Equity Ratio* dengan MTB memiliki nilai koefisien positif 0.047

dengan nilai signifikansi uji t yang diperoleh sebesar 0.305 lebih besar dari 0,05, maka variabel MTB tidak berpengaruh signifikan terhadap PRTF. Laporan keuangan memberikan pengaruh kepada investor mengenai informasi penting yang dimiliki manajemen perusahaan, misalnya perkiraan manajemen dan profitabilitas perusahaan. Laporan keuangan yang tidak memberikan tingkat *disclosure* yang memadai oleh sebagian investor dipandang sebagai laporan keuangan yang berisiko. Apabila investor menilai suatu perusahaan berisiko tinggi berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan, maka nilai *return* yang diharapkan oleh investor juga tinggi, yang pada akhirnya akan menyebabkan tingginya biaya ekuitas yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, laporan keuangan dengan informasi berkualitas memiliki daya informasi akuntansi yang berguna sebagai pengaruh bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi dan menilai kinerja manajemen perusahaan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Plumlee, Brown dan Marshall (2009), Dhaliwal, Li, Tsang dan Yang (2009), Verrecchia (1997) dan Botosan (1997). Semakin besar pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini berupa pengungkapan CSR disertai dengan daya informasi akuntansi yang baik, maka semakin rendah *cost of equity capital*-nya (Botosan, 1997) dan mengakibatkan semakin tinggi profitabilitasnya. Pengungkapan CSR dengan daya informasi akuntansi yang baik merupakan keuntungan potensial dari pengungkapan. Keuntungan tersebut berupa meningkatnya jumlah investor, mengurangi estimasi risiko dan mengurangi asimetri informasi yang masing-masing menunjukkan pengurangan *cost of equity capital* perusahaan (Lang dan Lundholm, 1996). Menurut Francais *et al.* (2004) relevansi nilai adalah salah satu atribut dasar akuntansi yang berkualitas. Informasi akuntansi berkualitas tinggi adalah *pre-conditional* untuk fungsi pasar modal dan perekonomian secara keseluruhan sehingga menjadi penting bagi investor, perusahaan dan pembuat standar akuntansi. Investor mengandalkan informasi akuntansi dalam menentukan harga saham dan perusahaan yang memberikan informasi yang berkualitas baik memiliki kelebihan dalam hal biaya modal yang lebih rendah. Sehingga semakin besar tingkat pengungkapan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan yang berupa pengungkapan CSR ditambah dengan daya informasi yang baik, maka mengakibatkan semakin baik profitabilitasnya.

PENUTUP

Simpulan

Pertama. *Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Profitabilitas Perusahaan.* Hasil analisis data menunjukkan tidak adanya pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas (PRTF). Ini ditunjukkan dengan hasil statistik CSRI yang memberikan koefisien parameter 0,309 dengan tingkat signifikansi 0,064 yang berarti memberikan pengaruh yang tidak signifikan kepada PRTF. Walaupun hasil yang diperoleh tidak signifikan tetapi banyak manfaat yang diperoleh perusahaan dengan pelaksanaan *corporate social responsibility*, antara lain produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati investor. *Corporate social responsibility* dapat digunakan sebagai alat *marketing* baru bagi perusahaan bila itu dilaksanakan berkelanjutan. Untuk melaksanakan CSR berarti perusahaan akan mengeluarkan sejumlah biaya. Akan tetapi dengan melaksanakan CSR, citra perusahaan akan semakin baik sehingga loyalitas konsumen makin tinggi.

Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu yang lama, maka penjualan

perusahaan akan semakin membaik, dan pada akhirnya dengan pelaksanaan CSR, diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan juga meningkat (Satyo, 2005 dalam Sutopoyudo, 2009). Oleh karena itu, CSR berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan sebagai hasil dari peningkatan penjualan perusahaan dengan cara melakukan berbagai aktivitas sosial di lingkungan sekitarnya. **Kedua.** Pengaruh Daya Informasi Akuntansi sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dan Profitabilitas Perusahaan. Hasil analisis data menunjukkan tidak adanya pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas (PRTF). Penelitian ini menunjukkan bahwa daya informasi akuntansi yang diukur dengan *Market to Book Value of Equity Ratio* dengan MTB memiliki nilai koefisien positif 0.047 dengan nilai signifikansi uji t yang diperoleh sebesar 0.305 lebih besar dari 0,05, maka variabel MTB tidak berpengaruh signifikan terhadap PRTF.

Tetapi daya informasi akuntansi dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan oleh manajemen dalam menetapkan besarnya profitabilitas yang akan dicapai. Investor mengandalkan informasi akuntansi dalam menentukan harga saham dan perusahaan yang memberikan informasi yang berkualitas baik memiliki kelebihan dalam hal biaya modal yang lebih rendah. Sehingga semakin besar tingkat pengungkapan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan yang berupa pengungkapan CSR ditambah dengan daya informasi yang baik, maka mengakibatkan semakin baik profitabilitasnya

Implikasi. Pengungkapan CSR dengan daya informasi akuntansi yang baik merupakan keuntungan potensial dari pengungkapan. Keuntungan tersebut berupa meningkatnya jumlah investor, mengurangi estimasi risiko dan mengurangi asimetri informasi yang masing-masing mengindikasikan pengurangan biaya perusahaan.

Berdasarkan dari hasil dari penelitian ini dapat diimplikasikan bahwa daya informasi akuntansi terbukti mempengaruhi hubungan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) dengan *profitabilitas* (PRTF) yakni memperkuat pengaruh positif CSR terhadap PRTF. Semakin besar tingkat pengungkapan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan yang berupa pengungkapan CSR disertai dengan daya informasi yang baik, maka semakin mempunyai dampak positif dalam meningkatkan *profitabilitas*-nya.

Saran. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Beberapa saran yang dikemukakan yang dapat digunakan untuk menambah referensi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: (1) Penelitian ini hanya menggunakan masa pengamatan selama 2 tahun setelah penerapan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan masa pengamatan yang lebih lama lagi. (2) Penelitian ini menggunakan proksi *return on assets* (ROA) untuk mengukur *profitabilitas*. Penggunaan proksi lainnya seperti *residual income model* ataupun mengkombinasikan kedua proksi ini diharapkan akan dapat menyempurnakan hasil penelitian selanjutnya. (3) Pengukuran daya informasi akuntansi dalam penelitian ini menggunakan *market value of equity*. Penggunaan laba akuntansi (*earnings*) juga memberikan informasi dan bermanfaat dalam penilaian sekuritas. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan kombinasi antara kedua proksi tersebut untuk menjelaskan daya informasi akuntansi sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, Luciana, dan Wijayanto, Dwi, (2007) "Pengaruh Environmental Performance dan Environmental Disclosure terhadap Economic Performance", FEUI, *The 1st Accounting Conference*, 7-9 September 2007.
- Anggraini, Fr. Reni Retno. (2006) "Pengungkapan informasi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan (studi empiris pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta)". *Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang, 23-26 Agustus 2006.
- Ball dan Brown. (1968) An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers. *Journal of Accounting Research*. Autumn.
- Basamalah, S., Anies dan Jermias, Johnny. (2005) "Social and Environmental Reporting and Auditing in Indonesia: Maintaining Organizational Legitimacy?" *Gadjah Mada International Journal of Business*, January-April, 7 (1), 109 - 127.
- Dhaliwal, D. O. Z. Li, Tsang A. H., dan Yang Y. G. (2009) "Voluntary Non-Financial Disclosure and the Cost of Equity Capital: The Initiation of Corporate Social Responsibility Reporting", *The Accounting Review*, 86 (1), 59-100.
- Fama, E. F. dan French K. R. (1992) The Cross Section of Expected Stock Returns, *Journal of Finance*, 47, 427-466.
- Feliana, Y ie Ke. (2007) "Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan dan Transaksi Dengan Pihak-Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa Terhadap D aya Informasi Akuntansi". *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Francis, J., LaFond, R., Olsson, P. dan Schipper, K. (2004) "Cost of Equity and Earnings Attributes". *Accounting Review*, 79 (4), 967-1010.
- Freeman, R. (1987) *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman, Boston, MA.
- Ghozali, Imam. (2009) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gray, R., Owen, D. dan Maunders, K. (1987) *Corporate Social Reporting: Accounting and Accountability*, Prentice-Hall, London.
- Gray, Rob., Kouhy, Reza., dan Lavers, Simon. (1995) "Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure". *Accounting, Auditing and Accounting Journal*. 8 (2), 47-77.
- Guthrie, J. dan Parker. L.D. (1990) Corporate Social Disclosure Practice: A Comparative International Analysis, *Advances in Public Interest Accounting*, 3, 159-175.
- Hackston, D. dan Milne, M.J. (1996) "Some Determinets of Social And Environmental Disclosure In New Zaeland Compenies". *Accounting and Auditing jurnal*, 9 (1), 77-108
- Hartono, Jogianto. (2003) *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. edisi Ketiga. BTFE. Yogyakarta.
- Hartono, Jogianto. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi 2007. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Hasan, I. dan Asokan, Anandarajan. (2003) Transparency and Value Relevance: The Experience of some MENA Countries. *Preliminary Version*.
- Hellstrom, K. (2005) The Value Relevance of Financial Accounting Information in a Transitional Economy: The Case of the Czech Republic. *SSE/EFI Working Paper Series in Business Adminstration*,10.

- Hendriksen, E., (1998) *Teori Akunting 5th*. Buku Satu. Interaksara, Batam.
- Ibrahim, M. K., M., Raudah, D., Haslinda, Y., Normahiran, M. Y. (2003) "Value Relevance of Accounting Numbers: An empirical Investigation of Purchased Goodwill". *Malaysian Accounting Review*, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Jensen, M., (1978) "Some anomalous evidence regarding market efficiency". *Journal of Financial economics*. 6, 95-102.
- Junaedi, Dedi. (2005) "Dampak Tingkat Pengungkapan Informasi Perusahaan terhadap Volume Perdagangan dan Return Saham: Penelitian Empiris terhadap Perusahaan-Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Juli-Desember, 2 (2), 1-28.
- Komalasari, P. T., & Baridwan, Zaki. (2001) "Asimetri Informasi dan Cost of equity capital". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 1 (4), 64-81.
- Lang, M. H., dan Lundholm, Russell J. (1996) "Corporate Disclosure Policy and Analyst Behavior". *The Accounting Review*, 71 (4), 467-492.
- Mardiyah, Aida Ainul. (2002) "Pengaruh Informasi Asimetri dan Disclosure terhadap Cost of Capital". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 5 (2), Mei, 229-256.
- Murni. (2003) "Pengaruh Luas Ungkapan Sukarela dan Asimetri Informasi terhadap Cost of Equity Capital pada Perusahaan Publik di Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi VI*.
- Naimah, Zahroh dan Utama, Siddharta. (2006) "Pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan, dan profitabilitas perusahaan terhadap koefisien respon laba dan koefisien respon nilai buku ekuitas: Studi pada perusahaan manufaktur di BEJ". *Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang.
- Ohlson, J. A. (1995) Earnings, Book Values and Dividends in Equity Valuation. *Contemporary Accounting Research*, 11 (Spring), 661-687.
- Plumlee, M., D. Brown, and S. Marshall. (2009) The impact of voluntary environmental disclosure quality on firm value. *Working paper*, University of Utah.
- Richardson, A., and M. Welker. (2001) Social disclosure, financial disclosure and the cost of equity capital. *Accounting, Organizations and Society*, 26, 597-616.
- Rustiariani (2009) "Pengaruh Corporate Governance Pada Hubungan Corporate Responsibility Dengan Nilai Perusahaan". *Tesis*. Denpasar: Universitas Udayana
- Sembiring, Rismanda, Eddy. (2005) "Kinerja Keuangan, Political Visibility, Ketergantungan pada Hutang, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Perusahaan". *Simposium Nasional Akuntansi VI*, Surabaya.
- Siregar, Chairil N. (2007) "Analisis Sosiologis terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility pada Masyarakat Indonesia". *Jurnal Sosioteknologi*, Edisi 12 Tahun 6, Desember.
- Tandelin, Firdaus. (2001) Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Yogyakarta: B PFE.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. www.castleasia.com
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. www.legalitas.org/incl-php/buka.php
- Utami, W. (2005) "Pengaruh Manajemen Laba terhadap Biaya Modal Ekuitas: (Studi pada Perusahaan Publik Sektor Manufaktur)". *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VIII*, Solo, 15-16 September, hal 100-116.
- Utomo. (2000) Praktik Pengungkapan Sosial Pada Laporan keuangan Tahunan Perusahaan

- di Indonesia. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi 3*, hal 99-122
- Widiastuti, Rini. (2002) ‘Pengaruh Model Mekanik, Ukuran Perusahaan, dan Rasio Ungkitan pada Ketepatan Prakiraan Laba’. *Simposium Nasional Akuntansi V*, Semarang
- Zarkasyi, Moh. Wahyudin. (2008) *Good Corporate Governance: pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.